

BAB II

MASYARAKAT FEODAL DAN POLITIK DINASTI

A. Pengertian Masyarakat Feodalisme

1. Masyarakat Feodalisme

Masyarakat feodalisme ialah bagian dari politik dan budaya yang tersebar dan tertua di muka bumi, setua perjalanan manusia itu sendiri. Paham ini merupakan bagian dari proses politik dan budaya yang terjadi di dunia ini. Feodalisme ialah sebuah fase dalam perjalanan sistem sosial dari bentuk primitif ke bentuk sosial modern. Urutannya dimulai dari bentuk sistem sosial primitif, sistem sosial feodal atau tradisional, selanjutnya ke sistem sosial dalam bentuk yang modern hingga sekarang. Sistem sosial masyarakat primitif sangat sederhana, bahkan, tidak jauh berbeda dengan sistem sosial binatang. (Mulya, Feodalisme dan Imperialisme di Era Global, 2012)

Selanjutnya, bentuk masyarakat primitif tersebut mengalami perubahan, sistem sosialnya menjadi lebih maju, berubah menjadi masyarakat feodal, yang sistem sosialnya sudah terstruktur sedemikian rupa. Contohnya, terbentuknya pemerintahan yang terpusat, bukan lagi berada di tangan para kepala suku, namun sudah di tangan raja yang membawahi suku-suku, yang tergabung dalam wilayahnya. Dengan demikian, feodalisme merupakan bentuk dari kemajuan sistem sosialnya yang mencakupi bidang politik dan budaya dari masyarakat primitif.

Feodalisme adalah babak baru dari perpolitikan dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, dalam masyarakat primitif, dapat dikatakan hampir tidak ada bentuk dan aktivitas politik. Politik sebagai suatu pemahaman terhadap permasalahan kekuasaan tergolong masih sangat sederhana, tidak jauh seperti yang terjadi di dunia binatang, dimana yang kuatlah yang berkuasa. Tetapi, sesudah beralih ke zaman feodal, bentuk perpolitikan sudah jelas dan sistem kekuasaan telah terstruktur sedemikian rupa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tetapi, struktur kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil dari masyarakat yang disebut sebagai kaum bangsawan. (Mulya, Feodalisme dan Imperialisme di Era Globalisasi, 2012)

Sistem dalam mempertahankan kekuasaan juga telah tergolong canggih menggunakan strategi yaitu dengan segala pendekatan pada golongan masyarakat, melalui pendekatan religi dan budaya. Budaya yang ada didalamnya termasuk juga religi, baik yang sudah ada ataupun bentuk-bentuk baru sebagai pengembangannya, telah menjadi bagian dari kekuasaan yang selanjutnya dikendalikan seutuhnya oleh para feodalis. Dalam posisinya sebagai bagian dari kekuasaan, budaya lebih berfungsi untuk menjaga eksistensi kekuasaan dalam paham feodalisme.

Dimana budaya religi dan tradisi menjadi komponen utama dalam menjaga eksistensi feodalisme. Itu menjadikan sistem kekuasaan ini benar-benar tak akan tergantikan. Hingga sekarang ini sistem kekuasaan yang diciptakan oleh feodalisme masih sangat kuat dan menjadi andalan yang diterapkan di banyak negara, terutama negara-negara timur salah satunya

Indonesia. Demikian pula yang terjadi dalam bidang budaya, bentuk budaya yang ada dan berkembang dalam era primitif juga tidak berbeda dengan bentuk perpolitikannya. Meskipun lebih maju dari masyarakat binatang, kondisinya masih belum jauh dari statis. (Mulya, Feodalisme dan Imperialisme di Era Globalisasi, 2012)

Akan tetapi, sesudah memasuki era feodalisme, bentuk dan kondisi budayanya sudah mengalami perubahan yang sangat jauh berbeda, terutama dalam hal sistem sosial. Jika dalam era primitif bentuk hubungan anatar manusia hanya terikat satu ikatan keluarga atau sekelompok suku, hubungan tersebut mencair menjadi anatar keluarga dan antar suku di era feodalisme. Mereka saling berhubungan dan mengadakan kontak tanpa takut terjadi friksi. Dalam era feodalisme telah terbentuk sistem sosial yang mengatur hubungan antar warga yang berupa tradisi dan adat-istiadat hingga dapat mencegah terjadinya benturan atau konflik dalam masyarakat yang sebelumnya tidak ada di era primitif.

Oleh karena itu, sistem pemerintahan feodal juga disebut sebagai sistem pemerintahan tradisional karena dalam menjalankan pemerintahan para penguasa mengandalkan sistem sosial yang bertumpu ke tradisi dan adat yang dibentuknya. Dalam era feodalisme ada sistem pemerintahan yang mengatur hubungan dalam bermasyarakat dan mengontrol tradisi dan adat-istiadat sedangkan dalam era primitif belum ada. Dengan itu, sangat jelas bahwa dalam era feodalisme, kebudayaan telah mengalami kemajuan yang

besar dari era sebelumnya (Era Primitif). (Mulya, Feodalisme dan Imperialisme di Era Globalisasi, 2012)

Di era feodalisme ini masyarakat tidak meningkatkan perubahan seperti di era primitif ke era feodalisme yang mengalami perubahan di era feodalisme ini masyarakat mengalami kesulitan dalam berpikir terbuka dan masyarakat pada masa ini sangat sulit untuk berpikir kedepan melainkan hanya berpikir kebelakang yang mentalitasnya sulit menerima perubahan dan perbedaan.

2. Perkembangan Masyarakat Feodalisme

Setelah terlepas dari kekuasaan pemerintahan kolonial, masyarakat kembali terperangkap dalam sistem kekuasaan feodal. Yang mana para penguasa kembali pada pola pikir dan berperilaku sebagaimana kaum feodal yang hanya berorientasi kepada keluarga, tahta, harta, dan wanita. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok. Jadi, pelaksanaan kekuasaan hanya untuk memenuhi kepentingannya. Rakyat dan Negara masih diperlakukan seperti yang terjadi dalam sistem kekuasaan feodal. Bukan seperti yang ada dalam sistem pemerintahan modern, dimana mereka menjadi tanggung jawab, yang harus diupayakan semaksimal mungkin kemakmuran, kesejahteraan, kejayaan, dan kebesarannya.

Dalam sistem kekuasaan feodal, mereka menjadi sarana untuk mendapatkan kepentingan yang mengacu kepada tiga hal yang sudah sering disebutkan di atas (keluarga, harta, dan tahta). Keberadaanya diposisikan dan dipandang sebagai sarana yang dimanfaatkan guna mendapatkan

kesenangan, kejayaan, kemakmuran, dan kebesaran bagi mereka secara pribadi atau kelompoknya. Memang dalam fakta mereka sudah menerapkan sistem pemerintahan modern yang mengarah ke sistem pemerintahan barat yang disebut demokratik. (Mulya, Feodalisme dan Imperialisme di Era Globalisasi, 2012)

Meskipun masih banyak yang kembali ke bentuk pemerintahan monarki, namun dalam sistem pemerintahannya juga sudah menerapkan sistem pemerintahan modern yang di dalamnya terdapat lembaga dan kementerian atau departemen-departemen yang menangani kepentingan rakyat, dan negara yang di era feodalisme. Tetapi dalam kekuasaan feodalisme, berbagai sektor dalam pemerintahan modern adalah pos-pos baru, yang di samping sebagai jabatan untuk mendudukan orang-orangnya, juga sebagai sarana dalam *bargaining position* terhadap kelompok-kelompok lain.

Dengan demikian, kekuasaan yang berada dalam genggamannya dapat bertahan lebih lama bahkan turun-temurun dan langgeng sampai pada generasi berikutnya. Dari itulah, negara-negara baru yang menerapkan sistem pemerintahan modern masih lekat dengan berbagai hal yang bersifat tradisional. Mereka masih menggunakan tradisi dan adat-istiadat lama, namun juga membentuk tradisi dan adat-istiadat baru sebagai langkah adaptasi terhadap perkembangan zaman. Rakyat kembali dibelenggu oleh berbagai norma yang terkandung di dalamnya, yang bahkan jauh lebih jeras

dan ketat dari era sebelumnya. (Mulya, Feodalisme dan Imperialisme di Era Globalisasi, 2012)

Sistem kekuasaan feodal sudah mengalami pembaharuan, terutama mengadopsi dari sistem kekuasaan kolonial dan sistem pemerintah modern atau dengan kata lain *neofeodalisme*. Dalam sistem kekuasaan *neofeodal* (modern) ini, kondisi yang dialami rakyat jauh lebih memperhatikan dari sebelumnya karena cakupannya menjadi lebih luas dan menyeluruh, lebih mendalam dan lebih kuat. Oleh karena itu, kita sering melihat banyak penderitaan yang dialami, rakyat menjadi semakin miskin. Ironisnya hal itu terjadi di Negara yang kaya sumber alam dan subur tahan pertaniannya, yakni Indonesia.

Maka menjadi tidak aneh jika rakyatnya banyak yang mengeluh dan berkata lebih baik di zaman penjajahan daripada sekarang sudah hidup dalam Negara yang merdeka dan demokratis tetapi masih sengsara dan masih banyak para penguasa yang hanya mementing diri sendiri dan kelompoknya yang membuat rakyatnya mengalami kemiskinan akibat dari perilaku yang seharusnya sudah tidak terjadi lagi di Negara yang sudah merdeka dan demokrasi ini yang seharusnya rakyat menjadi aman, sejahtera, dan makmur. Namun hal ini tidak terjadi di era modern ini sistem kekuasaannya masih sama seperti dulu bahkan lebih kacau dalam sistem pemerintahannya.

B. Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional yang tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Oligarki ditubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasakan atas keinginan para penguasa, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integrasi calon.

Secara bersamaan politik dinasti terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan partai politik. Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga status di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah mengganti pertahan. Regulasi yang lemah untuk memangkas politik dinasti turut menjadi penyebab meluasnya politik dinasti dalam pemilu. Politik dinasti menjadikan fungsi checks and balances menjadi lemah yang berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh para penguasa dan kerabatnya. (Susanti, 2018)

Dampak adanya politik dinasti ini dapat merusak Negara karena politik dinasti ini hanya memakai keluarganya saja dalam pemerintahan kekuasaa berikut dampak dari politik dinasti :

1. Politik dinasti dianggap hanya menggalangakan kekuasaan sekelompok orang.
2. Tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten, untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan.
3. Sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

4. Politik dinasti ini tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan kerajaan.

Selain dari adanya dampak tersebut, cita-cita Negara menjadi tidak terealisasikan, karena pemimpin atau pejabat Negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu politik dinasti ini bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab Indonesia bukanlah Negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Melainkan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang demokrasi yang mana rakyatnya bebas berpendapat dan bebas mengemukakan aspirasinya. (Susanti, 2018)

Tetapi masih banyak orang-orang yang tidak memikirkan dampak dari adanya sistem politik dinasti ini yang mana seharusnya masyarakat atau orang-orang yang memiliki skill harus berada pada posisi yang seharusnya, tetapi dalam politik dinasti ini orang-orang yang berkompeten tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Melainkan ditempati orang-orang yang tidak memiliki skill namun mereka memiliki keluarga dalam pemerintahan tersebut. Hal inilah yang dapat merusak sistem pemerintahan di Indonesia.

C. Demokrasi

Demokrasi merupakan gambaran dan struktur organisasi pemerintahan yang sebagian rakyat ikut serta memerintah dengan penghubungan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyatnya. Demokrasi disebut juga dengan ketentuan atau pendapat hidup yang mementingkan persamaan kekuasaan dan kewajiban

dengan tingkah laku yang sama untuk semua warga Negara. Demokrasi ialah pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tiang utama untuk membantu sistem politik yang merakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan dengan visi untuk memilih wakil rakyat yang baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah juga untuk membuat pemerintahan yang demokratis. (Nadriliun, 2012)

Demokrasi adalah cara untuk memenuhi perubahan atas apa yang terjadi dimasa lalu, memperbaiki hak dalam memilihkan pemimpin kepada rakyat pemerintah dibawah pengamatan rakyat. Dalam sejarah ketatanan republik Indonesia yang sudah lebih dari separuh abad, kemajuan demokrasi dan melalui naik turunnya perubahan dari demokrasi tersebut. Masalah yang dialami oleh rakyat Indonesia adalah bagaimana cara memajukan kehidupan ekonomi dan membuat kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang beragam. (Lubis, 2018)

D. Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia

Untuk bisa melakukan demokrasi dengan baik, rakyat, penguasa, pemerintah, dan pelaksana haru tahu prinsip-prinsip demokrasi yang mana prinsip itu ialah seperti berikut ini :

1. Pemililik Negara adalah rakyat akhirnya dominasi rakyatlah yang menguasai kekuasaan tertinggi, oleh karena itu semua warga Negara mempunyai wewenang untuk ikut serta memilih wakil rakyat yang akan

mewakilinya saat menguasai kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk dapat dipilih untuk jabatan tersebut atau jabatan dibidang lainnya.

2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi didalam suatu Negara, dengan status anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali.
3. Tidak ada pengistimewaan terhadap individu ataupun kepada kelompok atau partai tertentu. Diantaranya tidak ada pengistimewaan pada jabatan apapun karena adanya ketetapan Undang-undang. (Gianto, 2019)
4. Harus mempunyai undang-undang yang menyusun tentang struktur sistem kekuasaan dalam Negara dan prosedur pelaksanaan kerjanya.

E. Demokrasi Modern

Demokrasi modern adalah bentuk demokrasi pemerintahan yang mana dalam sebuah pemerintahan atau konstitusi itu menjamin hak dasar individu dan juga hak berpolitik, keadilan, kebebasan memilih dan juga hukum yang independen. Yang mana dalam era demokrasi modern ini memiliki kaitan dengan masyarakat feodal, dan politik dinasti yang seharusnya kedua hal tersebut tidak boleh lagi diterapkan dalam demokrasi modern ini. Karena kedua hal tersebut dapat merusak sistem pemerintahan yang sudah demokrasi modern yang seharusnya masyarakat sudah berpikir terbuka. (Gianto, 2019)

Namun dengan masih adanya masyarakat feodal dan politik dinasti ini pikiran masyarakat yang seharusnya modern, kembali lagi pada masa lalu yang

mana masih menggunakan tradisi dan adat-istiadat, kekuasaan yang turun temurun dan itulah yang menyebabkan demokrasi di Indonesia ini hancur dan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.